BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005 – 2025 ,Sejak 1 Mei 1963 Papua menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cita-cita yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengarah pada disintegrasi bangsa yaitu tuntutan untuk menentukan nasib sendiri dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan masih tingginya kesenjangan antar kelompok, antar wilayah dan antar daerah.

Dalam kurun waktu tersebut, kebijakan dan arah pembangunan kurang memberikan arti penting dalam perubahan kondisi masyarakat, karena proses pembangunan secara nasional yang menyeragamkan seluruh daerah di Indonesia, berorientasi pada hasil bersifat pragmatis dan tidak bertorientasi pada proses. Hal ini menempatkan Papua pada kondisi yang kurang menguntungkan dalam pembangunan.

Proses pelembagaan sosial kemasyarakatan dan hukum tidak dikembangkan bahkan ditekan secara politis, sehingga menimbulkan ketidakadilan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum yang merupakan persoalan mendasar di Papua dan mengancam keberlanjutan proses pembangunan.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, pada tahun 2001 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagai pengakuan dan pemberian kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat Papua menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Ini merupakan babak baru bagi Provinsi Papua untuk menata dan membangun dirinya sesuai dengan adat istiadat dan potensi yang dimiliki untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Kampung/Kelurahan pada bagian (1) menjelaskan bahwa Pemerintaha kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan perangkata kelurahan dan (2) menjelaskan bahwa Badan Perencana Pembangunan Kampung/Kelurahan adalah Lembaga Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaa, Pelaksanaan dan Pendampingan Pembangunan di Kampung atau Kelurahan

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

Konsepsi pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungÂkan dengan aspek-aspek spasial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam

banyak hal membuktikan keberhasilan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan. Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada

monitoring dan evaluasi merupakan “daya dorong” guna mewujudkan sistem manajemen pembangunan daerah yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur tentunya menjadi harapan yang sangat besar bagi masyarakat, Dalam pencapaian sasaran memerlukan tingkat partisipasi masyarakat dalam penentuan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Untuk mencapai sasaran yang kedua dimana kegiatan tersebut dilakukan demi meningkatnya kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan untuk dapat mewujudkannya kondisi kemampuan masyarakat yang diharapkan. Sasaran terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sangat jelas mencantumkan bahwa partisipasi merupakan point utama.

Mengacuh pada latar belakang di atas maka dalam hal ini mendorong penulis untuk meneliti tentang “ ***Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Abepantai Kota Jayapura”***

1.2. MASALAH DAN PEMBATASAN MASALAH

1.2.1. Masalah

Masalah adalah suatu persoalan atau kesulitas yang selalu muncul di dalam kehidupan sehari-hari.

Menurtu para ahli (Prof.Dr.Sugiyono, 2003) Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan

pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Bertolak dari pendapat tersebut maka rumusan yang penulis rumuskan dalam masalah ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Abepantai Kota Jayapura?

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dalam batasan masalah penelitian agar terarah maka, penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Abepantai?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Jalan di Kelurahan Abepantai Kota Jayapura.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1). Secara Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung bagi program studi ilmu pemerintahan dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan.

(2). Secara Praktis.

Memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya partisipasi masyarakat, serta memberikan masukan bagi masyarakat di kelurahan Abepantai khususnya di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan partisipasinya terhadap pembangunaninfrastruktur jalan Kelurahan.

1.4. TINJAUAN PUSTAKA

1.4.1. Partisipasi

Istilah partisipasi sebenarnya diambil dari bahasa asing yaitu participation, yang artinya mengikut sertakan pihak lain. Menurut pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Arimbi (1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information.

Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Secara umum konsep dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat digambarkan sebagai peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Hal ini berarti memberikan kesempatan dan wewenang kepada masyarakat untuk aktif mengelola sumber daya yang ada, mengelola kemampuan mereka sendiri, menjadi subyek bukan sebagai obyek dalam pembangunan, berperan aktif dalam membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap kegiatan yang mempengaruhi tempat itu.

Menurut Sumarto (2003) bahwa partisipasi masyarakat adalah proses ketika masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat; sedangkan menurut Pitana (2002:56) menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses.

Arnstein (1969) merupakan orang yang pertama kali mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah (agency). Partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (citizen partisipation is citizen power).

Menurut Adisasmita (2006) menyatakan, “Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan

perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan". Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi perlu disadari percepatan pembangunan harus dimulai dari bottom-up, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan. Titik sentral pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya. Berkeinginan merubah dan memiliki keinginan untuk dirubah, merupakan aset terpenting untuk memberdayakan masyarakat.

1.4.2. Konsep Pembangunan

1. Teori Desentralisasi

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa Desentralisasi adalah Penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi

Alderfer dalam Muluk (2009, h.11), mengungkapkan bahwa terdapat dua prinsip umum dalam membedakan bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan kekuasaannya ke bawah.

2. Pengertian Pembangunan

Berbicara mengenai pembangunan artinya kita berbicara mengenai perubahan, kemajuan masyarakat kemajuan teknologi, perluasan wawasan dan pola piker masyarakat, perilaku dan gaya hidup masyarakat.

Dan semua itu tidak terlepas dari namanya proses perluasan, proses peningkatan, baik itu untuk kepentingan masyarakat maupun diri sendiri.

Menurut Inayatullah, 1967, Pembangunan ialah Perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri.[1]

Pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu desa kelurahan cirri utama pembanguan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa, kampung / kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong.

Hal yang sama juga dikemukaan oleh Talisiduhu Ndraha bahwa: Pembangunan desa/Kelurahan adalah proses dengan mana usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan dipaduhkan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat ke dalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional.

Bertolak dari penjelasan diatas Irwan dan Suparmoko menyatakan bahwa: Pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses dimana kelompok masyarakat yang ada bersama-sama dengan pemerintahan

[1] *HAW,Widdjaja, PENYELENGGAAN OTONOMI DI INDONESIA (Dalam rangka sosialisasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2005; hal:172-173*

setempat berusaha memperbaiki keadaan perekonomian, social dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan mengintegrasi masyarakat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sama seperti pandangan Rogers; Pembangunan adalah Suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang lauas dalam suatu masyarkat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material "termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai" untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Untuk melaksanakan (implementasi) program pembanguan desa diperlukan dukungan dari seluruh masyarakat kampong agar dapat mendukung pembangunan kampong seperti: (1). Partisipasi Masyarakat; sebagai bentuk semangat bersama, rasa kebersamaan dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, (2). Sumber daya partisipasi masyarakat juga akan membentuk pola piker yang berkembang dan maju. Dalam perencanaan pembangunan Sumber Daya Alama juga dalam membantu pembangunan di kelurahan demi kemakmuran rakyat setempat.

Pengertian pembangunan diartikan sebagai suatu "proses" pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya (Mustanir & Darmiah, 2016). Hal ini merupakan gambaran umum masyarakat luas (society).

Menurut Bachtiar Effendi (dalam Akbar Effendi, 2014) pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Korten dalam Patton (2005:62), pendekatan dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, harus diubah dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, artinya perubahan yang berlangsung dalam masyarakat dengan pendekatan pembangunan berorientasi pada masyarakat perlu diubah sebagai figur sentral pembangunan dengan dimensi.

1.4.3. Pembangunan Infrastruktur

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (dalam Akbar Effendi, 2014) menyebutkan, bahwa pentingnya Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunanbangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Infrastruktur adalah berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembagkan oleh agen-agen public yang bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pembuangan limbah listrik, penyediaan air, pembangunan limbah, dan pelayananpelayanan lainnya yang serupa.

Pembangunan itu baik dari segi perencanaan maupun dalam peleksanaanya, harus membuahkan hasil dari masyarakat luas. Artinya, bahwa bentuk serta cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk propek pengembangan potensi dan sumber kehidupan dimasa yang akan datang, bahwa sifat dan watak pembangunan yang akan dicapai itu harus sedemikian rupa bercirikan multidimensional, artinya bahwa pembangunan itu tidak harus saja mencakup suatu aspek saja melainkan harus mencakup seluruh aspek kehidupan (Mustanir & Jusman, 2016).

1.4.4. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya.

Menurut Grigg (dalam Kodoatie, 2005) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyedikan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Misalnya dalam pembangunan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa

sektor lainnya seperti, pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur segoyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar pemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

1.5. DEVISI KONSEP DAN OPERASIONAL INDIKATOR

1.5.1. Definisi Konsep

Berdasarkan penjelasan pada bagian tinjauan pustaka, maka dapat dirumuskan definisi konsep pada penelitian adalah:

a. Partisipasi Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

b. Pembangunan Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya.

1.5.2. Definisi Operasional

Berdasarkan penjelasan pada bagian tinjauan pustaka, maka dapat dirumuskan definisi operasional pada penelitian adalah:

a. Variabel Partisipasi Masyarakat dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat
2. Implementasi Program

b. Variabel Pembangunan Infrastruktur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Ketersediaan Pelayanan Publik
2. Komunikasi

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki dua variabel, yakni variabel pertama disebut variabel bebas yakni pasrtisipasi masyarakat dan variabel kedua disebut variabel terikat, yakni pembangunan infrstruktur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kelurahan Abepantai Kota Jayapura

1.6.3. Informan dan Sumber Data

Sumber informasi yang penulis peroleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. di kantor kelurahan abepantai dan masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan perincian responden adalah sebagai berikut:

Dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi atau sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 orang yang terdiri dari masyarakat.

Tabel Responden

No	Unsur Responden	Jumlah	Keterangan
1	Tokoh Masyarakat	4 Orang	
2	Tokoh Agama	2 Orang	Nasrani Dan Muslim
3	Toko Perempuan	2 Orang	
4	Toko Pemuda	2 Orang	
5	Pemerintah Kelurahan	6 Orang	
6	Masyarakat Kelurahan Abepantai	34 Orang	
7	Pemerintah Distrik	2 Orang	
8	Masyarakat umum	2 Orang	Masyarakat di luar Kelurahan
Jumlah		54 Orang	

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan system pengumpulan data ada yaitu system Observasi langsung, Wanwancara dengan informa, dan studi dokumen di lokasi penelitian sebagai berikut:

1) Observasi Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasip yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
2) Wawancara dalam penelitian ini wawancara digunakan sebagai media dalam pengumpulan data penelitian oleh peneliti kepada informan penelitian.

3) Studi Dokumen yang dimana penelitian mendapatkan dokumen atau data penelitian berupa dokumen kegiatan pembangunan infrastruktur di kelurana abepantai sebagai bentuk dari pengolahan data penelitian.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Suharsimi Arikunto (2012:209- 213) menjelaskan, bahwa analisis data meliputi 3 (tiga) langkah, yaitu: persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam analisis data adalah reduksi data dan tabulasi data.